

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	.ii
HALAMAN BEBAS PLAGIASI.....	.iii
KATA PENGANTAR.....	.iv
INTISARI.....	.vii
ABSTRACT.....	.ix
BAB I PENDAHULUAN	21
1.1. Latar Belakang.....	21
1.2. Rumusan Masalah.....	25
1.3. Tujuan Penelitian	28
1.4. Lingkup Penelitian.....	28
1.4.1. Lingkup Materi	28
1.4.2. Lingkup Wilayah	29
1.5. Manfaat Penelitian	29
1.6. Keaslian Penelitian	30
1.7. Sistematika.....	37
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	39
2.1. <i>Theory of Planning</i>	39
2.2. Hubungan antara Hukum dengan Penataan Ruang.....	40
2.2.1. Sistem Penataan Ruang di Indonesia	43
2.2.2. Peluang Penggunaan Diskresi oleh Kepala Daerah dalam Penataan Ruang...47	
2.2.3. Kebijakan Moratorium oleh Kepala Daerah	58
2.2.4. Teori Efektivitas Hukum	65
2.3. Tertib Tata Ruang	68
2.4. <i>Good Governance</i> dalam Penataan Ruang	72
2.5. <i>Urban Law</i>	75
2.6. Teori Stakeholder.....	77

BAB III	METODOLOGI PENELITIAN	80
3.1.	Desain Penelitian	80
3.1.1.	Metode Pengumpulan Data.....	83
3.1.2.	Metode Analisis Data.....	87
3.2.	Validitas dan Reliabilitas	96
BAB IV	GAMBARAN UMUM WILAYAH PENELITIAN	98
4.1.	Kondisi Fisik dan Geografis Kabupaten Sleman	98
4.2.	Perkembangan Ekonomi dan Demografi	107
4.2.1.	Kondisi Kependudukan dan Sosial Ekonomi	107
4.2.2.	Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).....	110
4.3.	Perkembangan Fisik dan Guna Lahan	117
4.3.1.	Perkembangan Fisik.....	117
4.3.2.	Penggunaan Lahan.....	118
4.3.3.	Pertumbuhan Investasi Swasta untuk Hotel, Apartemen, dan Kondotel di Kabupaten Sleman	119
4.4.	Tata Kelola Pembangunan Wilayah di Daerah dan Perangkat Daerah.....	127
4.5.	Permasalahan Pembangunan yang Perlu Diperhatikan dalam Penyelenggaraan Penataan Ruang Daerah	129
4.6.	Peran Masyarakat dalam Pembangunan di Sleman	132
BAB V	HASIL PENELITIAN, TEMUAN, DAN PEMBAHASAN	136
5.1.	Peta <i>Stakeholder</i> Kebijakan Moratorium.....	137
5.2.	Proses dan Dinamika Penyusunan Kebijakan Diskresi Moratorium Pembangunan Hotel dan Apartemen: <i>Public Discourses</i>	146
5.2.1.	Dasar Pengambilan Kebijakan Diskresi Moratorium Pembangunan Hotel dan Apartemen.....	149
5.2.2.	Aspek yang Dipertimbangkan dalam Pengambilan Kebijakan Diskresi Moratorium Pembangunan Hotel dan Apartemen	153
5.2.3.	Konsiderans Produk Kebijakan Diskresi Moratorium Pembangunan Hotel dan Apartemen.....	168
5.3.	Latar Belakang Penggunaan Diskresi Moratorium Pembangunan Hotel dan Apartemen oleh Kepala Daerah	194
5.3.1.	Pola Spasial Permohonan Izin Hotel, Apartemen, dan Kondotel	210

5.3.2.	Perkembangan Jumlah Perizinan Investasi Swasta berupa Hotel, Apartemen, dan Kondotel dari Tahun 2015-2019 (dalam moratorium Periode I).	216
5.3.2.1.	Izin Pemanfaatan Tanah (IPT).....	217
5.3.2.2.	Izin Mendirikan Bangunan (IMB)	220
5.3.2.3.	Tanda Daftar Usaha Pariwisata.....	224
5.3.2.4.	Perbaikan Dalam Kinerja Pemerintahan Daerah untuk Konsistensi Penataan Ruang.....	229
5.4.	Pengaruh Implementasi Moratorium Pembangunan Hotel dan Apartemen terhadap terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).....	233
5.5.	Pengaruh Implementasi Moratorium Pembangunan Hotel dan Apartemen terhadap PDRB dari Sektor Terkait	242
5.6.	Pengaruh Implementasi Moratorium Pembangunan Hotel dan Apartemen terhadap Konsistensi Penataan Ruang	249
5.7.	Pembahasan	257
5.8.	Diskusi Teoritik	273
BAB VI	PENUTUP	296
6.1.	Kesimpulan	296
6.2.	Saran	305
	Peraturan Perundang-undangan	314
Berita	315	
	Sumber Elektronik	316

DAFTAR GAMBAR

Gambar I-1 Literature Map dalam Penelitian	38
Gambar II-1 Pro dan Kontra <i>Regulatory System – Discretionary System</i>	46
Gambar II-2 Ilustrasi Stufenbau Theory dalam Tata Hukum Penataan Ruang	69
Gambar II-3 Hubungan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dengan Tertib Tata Ruang	71
Gambar II-4 <i>Power-Interest Grid</i>	78
Gambar III-1 Alur Penelusuran Informasi dan Data.....	85
Gambar III-2 Analisis Data secara Paralel dan Simultan selama Proses Penelitian	89
Gambar III-3 Tahapan Analisis Data menggunakan Teknik Coding.....	90
Gambar V-1 <i>Power and Interest Stakeholder Analysis</i> Kebijakan Moratorium.....	145
Gambar V-2 Persebaran Apartemen dan Hotel Sebelum Moratorium	146
Gambar V-3 <i>Timeline</i> Kedudukan dan Proses Penetapan Kebijakan Moratorium melalui Diskresi oleh Kepala Daerah.	148
Gambar V-4 Skema Sistematis Naskah Akademik.....	150

DAFTAR TABEL

Tabel II-1 Unsur Keberlakuan Hukum	66
Tabel III-1 Daftar Informan dan Partisipan dalam Penelitian melalui teknik Snowball.....	83
Tabel IV-1 Klasifikasi, Nama, dan Alamat Hotel Bintang di Kabupaten Sleman.....	122
Tabel IV-2 Apartemen dan Kondotel di Kabupaten Sleman, 2019.	126
Tabel V-1 Pemetaan Kepentingan, Sumber Daya, dan Peran/Tindakan Stakeholder dalam Moratorium	139
Tabel V-2 Klasifikasi Stakeholder.....	141
Tabel V-3 Kepentingan Stakeholder.....	141
Tabel V-4 Peran Stakeholder dalam Evaluasi Moratorium	144
Tabel V-5 Perbandingan Materi Naskah Akademis sebagai Dasar Penetapan Peraturan Bupati	151
Tabel V-6 Jumlah Kamar Hotel, Tingkat Hunian Kamar Hotel dan Rata-Rata Lama TinggalWisatawan di DIY	162